

## BANGUNAN GEDUNG

2021

PERDA No. 16, LD 2021/No.16, TLD 2021/No.273, 144 HLM.

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK :
- penyelenggaraan bangunan gedung di daerah dilaksanakan sesuai dengan asas otonomi yang bertujuan memberikan pengayoman dan memajukan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - bahwa untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya, penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu penetapan tata cara atau operasionalisasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di daerah.
  - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
  - Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung ini memuat tentang Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Standar Teknis; proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung; peran Masyarakat; dan pembinaan.
- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
    - a. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah

Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 137); dan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 218);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2021
- Penjelasan: 37 hlm.